

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990)
- Al Chaidar dkk., *Federasi atau Disintegrasi, Telaah Awal Wawancara Unitaria Versus Federalis Dalam Perspektif Islam, Nasionalisme dan Sosial Demokrasi*, (Jakarta: Madani Press, 2000)
- Amiek Soemarmi dan Sekar Pinilih, *Buku Ajar Hukum Tata Negara*, (Semarang: Undip Press, 2018)
- Didik Sukriono, *Hukum, Konstitusi, dan Konsep Otonomi: Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, (Malang: Setara Press, 2013)
- Enny Nurbaningsih, *Problematisasi Pembentukan Peraturan Daerah: Aktualisasi Wewenang Mengatur di Era Otonomi Luas*, (Depok: Rajawali Pers, 2020)
- Hasrun Hasan, *Hak Uji Materiil di Indonesia (Studi tentang Hak Uji Materiil Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Setelah Perubahan UUD 1945)*, (Depok: Pascasarjana Fakultas Hukum UI, 2002)
- Imam Soebechi, *Dinamika Pemikiran dan Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Ismail Hasani, *Pengujian Konstitusionalitas Perda*, (Jakarta: KPG, 2020)
- Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Depok: Rajawali Pers, 2017)
- Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan 1*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007)
- Jin-wook Choi, dkk., *Local Government and Public Administration in Korea* (Seoul: Local Government Official Development Institute, 2012)
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013)
- MPR RI, *Panduan Dalam Memasyarakatkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2003)
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Preneda Media Group, 2005)
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)
- Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2005)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2007)
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009)

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018)

Umbu Rauta, *Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah*, (Yogyakarta: GENTA Publishing, 2016)

Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009)

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

Ali Marwan HSB, *Judicial Review dan Legislative Review Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17, No. 1, 2020

Bagir Manan, *Peraturan Pemerintah Sebagai Pengganti Undang-Undang*, *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XXV, No. 295, 2010

Kezia M. Layuck dkk., *Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015*, Jurnal Lex Administrasium, Vol. VIII, No. 3, 2020

Mudiyati Rahmatunnisa, *Jalan Terjal Kebijakan Desentralisasi di Indonesia Pada Era Reformasi*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 3, 2015

Siti Marwiyah, *Kewenangan Konstitusional Presiden Terhadap “Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa”*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 44, No. 3, 2015

Taufik H. Simatupang. *Mendudukan Konsep Executive Review Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19, No. 2. 2019

Wahyu Tri Hartono. *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 Tentang Pembatalan Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15, No. 2. 2018

Yuniar Kurniawati. *Polemik Pengujian Peraturan Daerah (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman versus Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 4. 2016

Zaelani, *Pelimpahan Kewenangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9, No. 1, 2012

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Local Government Code of The Philippines 1991

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 Tentang Memorandum DPR-GR
Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan
Peraturan Perundangan Republik Indonesia

Tap MPR Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan
Peraturan Perundang-undangan

D. Sumber Lain

Ani Purwanti, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Lanjutan*, Bahan
Ajar Mata Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum,
Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Penyusunan dan
Pengawasan Perda Provinsi, Materi Pemaparan dalam Seminar
Nasional “Pembinaan dan Pengawasan Perda Pascaputusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor
56/PUU-XIV/2016” yang diselenggarakan pada tanggal 5 September
2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016